



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka penyusunan LAK BPK guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BPK periode 2020 - 2024. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good and clean government*

serta sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Perhatian pemilik kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap kinerja pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Kondisi ini kian menguatkan semangat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi BPK "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

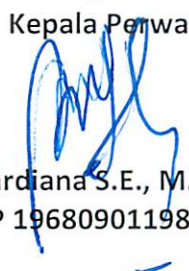
Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang ditandatangani Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo merupakan pengejawantahan atas sasaran strategis BPK guna mewujudkan visi dan misi BPK.

Akhirnya dengan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi terbaik, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya membangun kultur organisasi perwakilan yang lebih baik agar kepercayaan pemilik kepentingan terhadap kinerja BPK semakin meningkat.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Gorontalo, 28 Januari 2022

Kepala Perwakilan

Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFrA, CSFA 
NIP 196809011989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	9
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	12
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	12
2. ANGGARAN DAN REALISASI	12
3. SARANA DAN PRASARANA	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	20
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	20
B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	26
A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	26
1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021.....	26
2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA DUA TAHUN TERAKHIR.....	27
3. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IKU TAHUN 2021	28
4. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2021 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN	42
B. REALISASI ANGGARAN	43

BAB IV PENUTUP.....	45
A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM	45
B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR.....	45
C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IKU TAHUN 2021.....	48
D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2021	49

DAFTAR TABEL

TABEL 1. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPK PERWAKILAN PROVINSI	
GORONTALO	24
TABEL 2 PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	27
TABEL 3 PERCAPAIAN CAPAIAN IKU TAHUN 2019 DAN PERBANDINGAN DENGAN EMPAT TAHUN	
TERAKHIR	28
TABEL 4 PERBANDINGAN CAPAIAN IK TAHUN 2019 DENGAN TARGET KERJA 5 TAHUN	43
TABEL 5 ALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA MENCAPAI INDIKATOR KINERJA YANG DIHARAPKAN	44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	9
GAMBAR 2. KANTOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	14
GAMBAR 3. MESS PEGAWAI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	15
GAMBAR 4. RUMAH JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI GORONTALO	16
GAMBAR 5. RUMAH JABATAN STRUKTURAL ESELON III	16
GAMBAR 6. RUMAH JABATAN STRUKTURAL ESELON IV	17
GAMBAR 7. MUSHOLLA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	17
GAMBAR 8. KENDARAAN DINAS KEPALA PERWAKILAN	18
GAMBAR 9. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERWAKILAN	18
GAMBAR 10. MOTOR DINAS OPERASIONAL PERWAKILAN	19
GAMBAR 11. PETA STRATEGI AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI	23
GAMBAR 12. PETA STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	23

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bagian Keenam Pelaporan Kinerja Pasal 18 (1) yang menetapkan antara lain bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang terakhir kali diubah melalui Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang

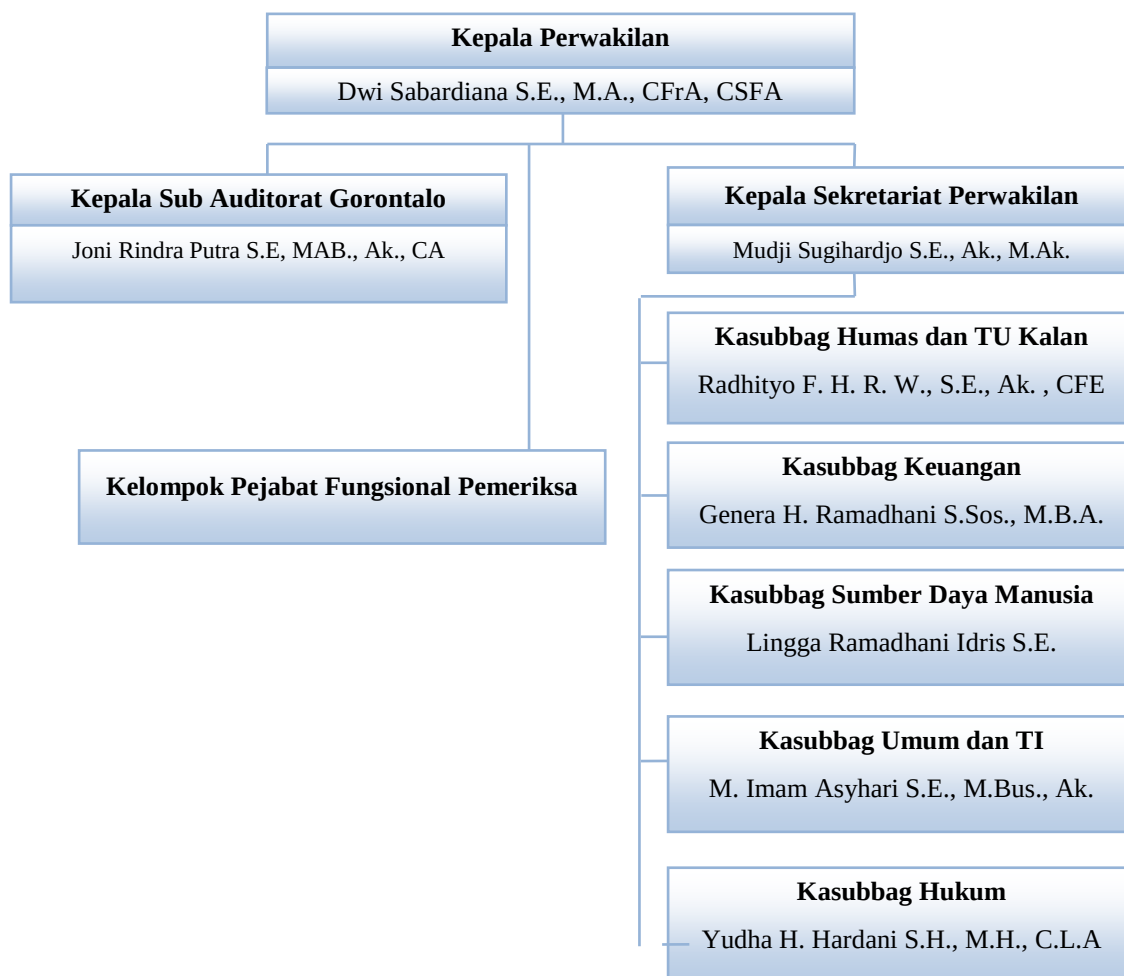
Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kesembilan Belas Pasal 735 ayat (1) yang menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI, dan Pasal 736 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 di atas, sesuai Pasal 737 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kecuali Pemeriksaan Investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pengkompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
13. Penyiapan bahan perumusan bahan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai delapan pejabat struktural yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian SDM, Kepala Sub Bagian Umum dan TI, Kepala Bagian Humas dan TU Kalan, dan Kepala Sub Bagian Hukum.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah unsur pelaksana BPK. Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

1. Sub Auditorat Gorontalo

Sub Auditorat Gorontalo mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi hasil kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

2. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN VI dan Auditorat Utama Investigasi.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki SDM per 31 Desember 2021 sebanyak 61 orang terdiri atas 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 22 Tenaga Tidak Tetap. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas delapan pejabat struktural yaitu Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian SDM, Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Sub Bagian Umum dan TI, 35 orang pemeriksa, dan 16 orang penunjang. Selain PNS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh tenaga tidak tetap berjumlah 22 orang yang terdiri atas satu orang tenaga administrasi, 13 orang satuan pengamanan (Satpam), empat orang pengemudi, dua orang tenaga medis yang terdiri atas dokter dan perawat, satu orang tenaga teknis, serta satu orang tenaga resepsionis.

Ditinjau dari masa kerja PNS di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, masa kerja seluruh PNS dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Masa kerja 4 tahun ke atas sebanyak lima orang
- b. Masa kerja 3 s.d. 4 tahun sebanyak 14 orang
- c. Masa kerja 3 tahun ke bawah sebanyak 32 orang

2. ANGGARAN DAN REALISASI

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh anggaran sebesar Rp14.691.502.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.115.052.265 atau 96,08% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun 2020 yakni anggaran sebesar Rp18.305.999.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.412.347.559,00 atau 95,12%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selama Tahun Anggaran 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak sebelas kali, dari nilai anggaran awal sebesar

Rp15.541.709.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp14.691.502.000,00. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Hasil pengukuran atas Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal BPK menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai nilai EKA sebesar 87,46% dengan rincian komponen pendukung sebagai berikut.

Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi	Nilai Efisiensi	Nilai Aspek Implementasi
96,08%	100%	96,06%	60,02%	87,46%

Berdasarkan evaluasi tersebut, nampak bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih memerlukan peningkatan dalam hal efisiensi anggaran perwakilan meskipun capaian tersebut masih berada di atas capaian rata-rata nilai efisiensi Auditorat Utama Keuangan Negara VI yaitu 58,46%.

Untuk nilai EPA, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 94,44%, masih berada di bawah capaian rata-rata nilai EPA Auditorat Utama Keuangan Negara VI yaitu 96,62%. Dua hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kinerja perwakilan, dan dikomunikasikan dengan Biro Keuangan untuk mendapat *insight* tentang bagaimana meningkatkan nilai efisiensi serta nilai EPA pada tahun 2022.

3. SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai sebagai berikut.

a. Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga bidang tanah pada lokasi berbeda yaitu :

- 1) Seluas 3.485 m² di Jln. Piola Isa diperoleh pada tahun 2012 digunakan untuk Mess Pegawai serta Rumah Jabatan Eselon IV s.d. Eselon II.

- 2) Seluas 5.931 m² di Jln. Tinaloga Nomor 3 diperoleh pada tahun 2009 digunakan untuk gedung kantor, poliklinik, ruang olah raga, dan gudang.
- 3) Selain itu tanah seluas 6.450 m² di Jln. Tinaloga No. 3 diperoleh tahun 2016, tanah tersebut masih kosong dan direncanakan akan digunakan untuk fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian tanah di Jln. Tinaloga No. 3 seluruhnya menjadi seluas 12.381m².

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terletak di Jln. Tinaloga Nomor 3, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, mulai ditempati pada awal tahun 2011. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo, Sebelah Timur/bagian depan kantor berbatasan dengan Jln. Tinaloga/Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sedangkan sebelah Selatan dengan Kantor Pengadilan Tinggi dan Barat berbatasan dengan areal persawahan. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu.

- 1) Lantai pertama seluas 926 m².
- 2) Lantai dua seluas 1.352 m².
- 3) Lantai tiga seluas 838 m².



Gambar 2. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

c. Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada tahun 2012 dibangun Mess dua lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 325 m². Fasilitas Mess terdiri atas 19 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, ruang makan, *lobby*, dan ruang pengelola.



Gambar 3. Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

d. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, pada tahun 2013 mulai dibangun Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas masing-masing kurang lebih 200 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas dua kamar tidur utama, dua kamar tidur tamu, dua kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.



Gambar 4. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo

e. Rumah Jabatan Struktural Eselon III dan IV

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2018 memiliki tujuh unit rumah jabatan struktural yang terdiri atas rumah jabatan struktural eselon III sebanyak dua unit dan struktural eselon IV sebanyak lima unit. Rumah jabatan tersebut dibangun pada tahun 2015, seluruh rumah jabatan telah dihuni sejak tahun 2016.



Gambar 5. Rumah Jabatan Struktural Eselon III



Gambar 6. Rumah Jabatan Struktural Eselon IV

f. Fasilitas Ibadah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki Musholla seluas 40 m² yang diberi nama Al Muhajirin yang dibangun pada tahun 2016, Musholla tersebut terletak disebelah barat gedung kantor atau disamping garasi mobil.



Gambar 7. Musholla BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

g. Kendaraan dan Peralatan Penunjang Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai kendaraan dan peralatan penunjang operasional, antara lain berupa kendaraan roda empat sebanyak delapan unit dan kendaraan roda dua sebanyak sembilan unit, lima alat ukur universal, dua belas mesin ketik listrik, PC 55 unit, *notebook* 53 unit, *printer* 50 unit, kalkulator 34 unit, mesin fotokopi enam unit, proyektor LCD 18 unit, *scanner* 46 unit dan *lift* 1 unit.



Gambar 8. Kendaraan Dinas Kepala Perwakilan



Gambar 9. Kendaraan Dinas Operasional Perwakilan



Gambar 10. Motor Dinas Operasional Perwakilan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 telah dibuat namun masih dalam proses penetapan dalam satu Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis.

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UUD 1945, BPK pada periode 2020-2024 akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

2. Misi

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan Misi 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

3. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

4. Sasaran Strategis

Untuk periode 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, usulan bahan pendapat dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

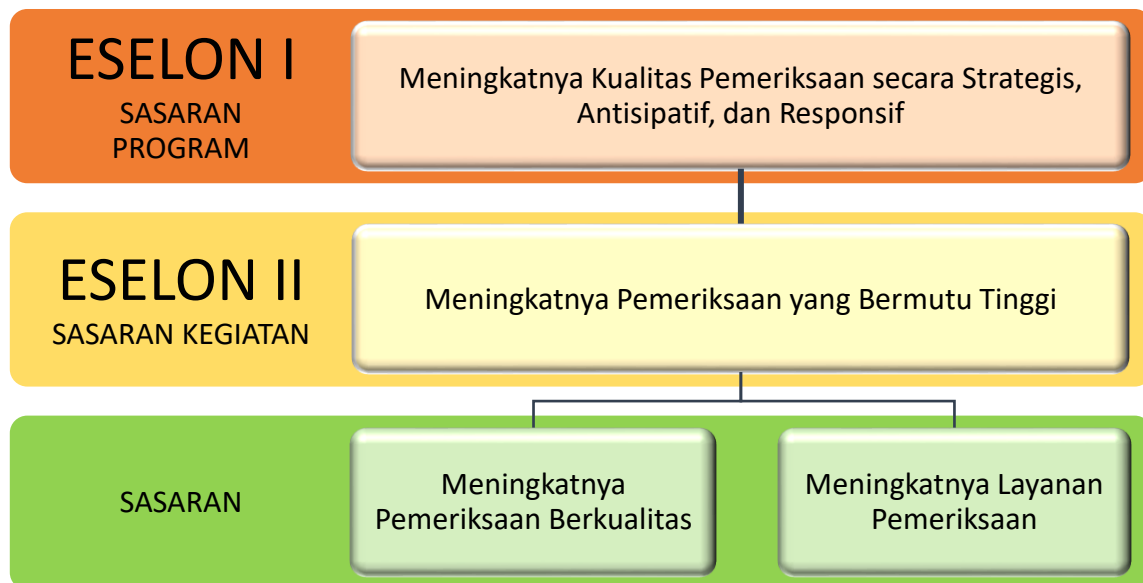
Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi dan usulan bahan pendapat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

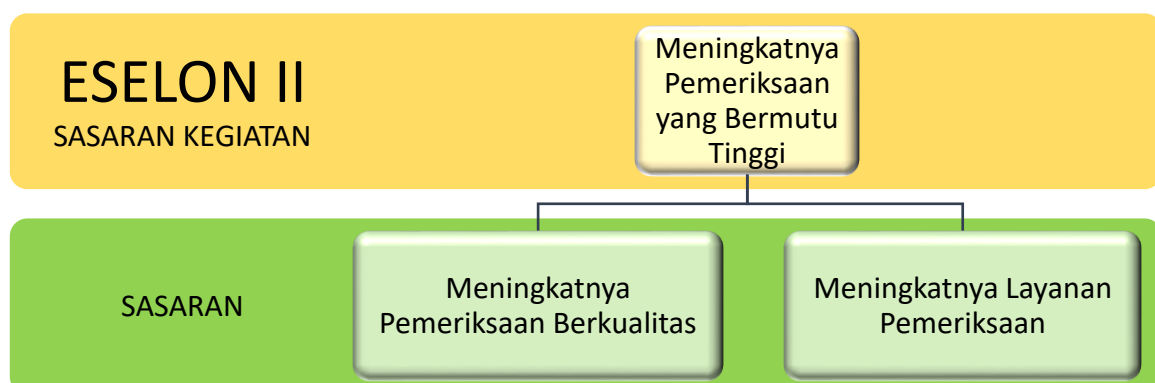
Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai kepanjangan BPK untuk wilayah Timur menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta

strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai tahun 2021. Keterkaitan tugas dan fungsi AKN VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis AKN VI berikut ini.



Gambar 11. Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara VI

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selaku satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berikut.



Gambar 12. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU tahun 2021. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember tahun 2020. Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dimuat pada tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja	Target PKPK 2021
(1)	(2)	(3)
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
IK 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menargetkan pencapaian atas 13 Indikator Kinerja, yang terdiri atas:

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;

4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP;
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memanfaatkan anggaran yang diberikan sebesar Rp14.691.502.000,00 untuk mencapai target-target tersebut dengan rincian pada Bab berikut.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian kinerja Tahun 2021. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember tahun 2020. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target dan realisasi Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 hasil evaluasi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dimuat pada tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja	Target PKPK 2021	Capaian Kinerja 2021	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,25%	86,25
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	72,83%	97,10
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100,00
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,60%	100,60
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,30%	100,30
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Memuaskan (4,41)	88,20
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (91,16)	105,00
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,66%	103,81
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	137,50%	105,00
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,89)	102,37

No.	Indikator Kinerja	Target PKPK 2021	Capaian Kinerja 2021	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
IK 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	92,43%	105,00
Total Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo				99,51

Tabel 2 Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA DUA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dengan skor lima tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan karena sejak tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah menggunakan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BPK periode 2020 – 2024, berbeda dengan tahun 2019 yang masih menggunakan indikator kinerja sesuai Renstra periode 2016 – 2020 sebelumnya. Hasil capaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata terdapat pencapaian IKU yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan atau tetap nilainya. Rincian Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada dua tahun terakhir dimuat pada tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Target PKPK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	71,43%	86,25%	100%
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	76,31%	72,83%	75%
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,40%	100%	100%
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,60%	100%
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	101%	100,30%	100%
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Memuaskan (4,47)	Memuaskan (4,41)	Sangat Memuaskan (5,00)
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (94,25)	AA (91,16)	A (87,00)

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Target PKPK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,66%	99,66%	96%
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	125%	137,50%	100%
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,47)	Memuaskan (3,89)	Memuaskan (3,80)
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%
IK 13	Tingkat Kinerja Anggaran	89,34%	92,43%	87,50%
Skor	Total BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	98,43	99,51	

Tabel 3 Pencapaian Capaian IKU Tahun 2021 dan Perbandingan dengan Tahun 2020

3. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IKU TAHUN 2021

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada tahun 2021 yakni IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut.

a. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Anggaran : Rp991.776.066,67

Realisasi : Rp925.107.508,17

Persentase : 93,28%

Rincian Output : Layanan Administrasi Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik Perwakilan Provinsi Gorontalo dan LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Indikator Kinerja 1 ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui *quality assurance* dan *quality control* dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil revidit itama.

Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan *quality control* dan *quality assurance* atas pelaksanaan pemeriksaan sebesar 100%, dan pencapaian ini telah sesuai dengan target Renstra 2016 – 2020. Pada periode Renstra 2020 – 2024 BPK Perwakilan

Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan *quality control* dan *quality assurance* agar kualitas pemeriksaan dan LHP dapat senantiasa terjaga, sehingga tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mencapai skor 71,43% dan dapat menaikkan capaian skornya di tahun 2021 menjadi 86,25%.

Aktivitas pelaksanaan *quality control* dan *quality assurance* dilaksanakan dengan cara melaksanakan *quality control* mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh seluruh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab di setiap penugasan serta melaksanakan *quality assurance* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Kepala Sub Auditorat dan Kepala Perwakilan untuk seluruh pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mewajibkan tim pemeriksa untuk menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan sesuai petunjuk pelaksanaan Kertas Kerja Pemeriksaan, dan menyimpan kertas kerja tersebut secara elektronik maupun secara fisik.

Meskipun telah mengupayakan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum dapat memperoleh hasil evaluasi yang memadai dari Direktorat EPP sehingga skor yang dicapai masih berada pada angka 86,25%, dari target sebesar 100%. Masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam setiap LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengingat pada tahun 2021 pelaksanaan pemeriksaan masih dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini membuat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan semakin berusaha memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

b. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Anggaran : Rp956.296.066,67

Realisasi : Rp889.736.345,67

Persentase : 93,04%

Rincian Output : Layanan Administrasi Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, LHP atas Bantuan Keuangan

Partai Politik Perwakilan Provinsi Gorontalo dan LHP
Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Indikator Kinerja 2 ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan saat itu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menjaga agar seluruh simpulan dari LHP sesuai dengan harapan penugasan pimpinan atau 100% untuk seluruh LHP, dan target 100% dapat dipertahankan secara konsisten sampai dengan tahun 2021.

Aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini yaitu dengan menyusun Program Pemeriksaan (P2) secara memadai dan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan P2. LHP yang telah diselesaikan kemudian akan diserahkan ke Direktorat EPP untuk dievaluasi kembali demi memastikan bahwa simpulan yang dimuat telah sesuai dengan harapan penugasan dalam P2.

Hasil evaluasi sampai dengan semester II tahun 2021 menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat menjaga kesesuaian hasil pemeriksaan dengan harapan penugasan sesuai P2, dengan skor 100%. Untuk menjaga capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengupayakan peningkatan kualitas *quality control* dan *quality assurance*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan.

c. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Anggaran : Rp139.223.666,67

Realisasi : Rp137.094.234,17

Persentase : 98,47%

Rincian Output : Layanan Administrasi Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Indikator Kinerja 3 ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebanyak dua kali dalam setahun.

Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4.684 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 7.320 rekomendasi atau sebesar 64,60%, capaian ini tidak memenuhi target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 75%. Hal tersebut terjadi karena antara lain Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah belum optimal berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah/SOPD/BUMD terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta belum tumbuhnya kesadaran terkait pentingnya perbaikan penyelesaian TLRHP BPK di lingkungan Pemda. Pada periode Renstra 2020 – 2024, di tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sempat mencapai persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 76,31%, dan capaian ini menurun pada tahun 2021 menjadi 72,83%.

Aktivitas dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah dengan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini bermanfaat dalam: (i) mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK; (ii) mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK; (iii) mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut; dan (iv) menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan semakin meningkatkan pemahaman Pemda tentang pentingnya penyelesaian TLRHP BPK melalui pertemuan dan surat dengan para Kepala Daerah dan instansi daerah terkait sebanyak dua kali dalam setahun dan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui aplikasi SiPTL agar proses penyelesaian TLRHP BPK bisa semakin dioptimalkan oleh Pemda. Pada akhir tahun 2021, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum melewati angka 75% yang menjadi target BPK secara nasional, karena baru mencapai 72,83%.

Untuk terus menjamin agar capaian tersebut dapat memenuhi target ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dan surat kepada

Kepala Daerah serta memaksimalkan aplikasi SiPTL. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

d. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Anggaran : Rp921.634.066,67

Realisasi : Rp855.498.820,67

Persentase : 92,82%

Rincian Output : Layanan Administrasi Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Indikator Kinerja 4 ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang, tugas, dan fungsi satuan kerja masing-masing dengan satu satuan kerja sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satuan kerja pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, meskipun sejak periode Renstra 2016 – 2020 sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan partisipasi aktif dalam seluruh pemeriksaan tematik nasional, yaitu dengan berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional diantaranya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Sama seperti tahun 2020, pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara konsisten berpartisipasi aktif dalam setiap pemeriksaan tematik nasional, sehingga capaian IKU ini bisa tetap mencapai target seperti tahun 2020.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan terus berpartisipasi dalam setiap pemeriksaan tematik nasional selama tahun 2021, sehingga IK ini dapat dicapai sesuai target sebesar 100%.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, penyelenggaraan pendidikan vokasi, serta upaya mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. Untuk tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

e. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Anggaran : Rp0,00

Realisasi : Rp0,00

Persentase : 0,00%

Rincian Output : Layanan Administrasi Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Layanan Sekretariat Perwakilan.

Indikator Kinerja 5 ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan APH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan secara konsisten dicapai sesuai target pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.

Selama tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk dapat memenuhi 100% permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, meskipun sampai tanggal 31 Desember 2021 tidak ada permintaan yang masuk. Ke depannya, BPK

Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi setiap permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan.

f. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Anggaran : Rp921.634.066,67

Realisasi : Rp855.498.820,67

Persentase : 92,82%

Rincian Output : Layanan Administrasi Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Indikator Kinerja 6 ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo minimal satu kali dalam periode Renstra. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan secara konsisten dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai Renstra 2020 - 2024 sehingga capaian pada tahun 2020 dan 2021 melebihi target 100% yang ditetapkan.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini pada tahun 2021 adalah dengan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan terkait pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga capaian Indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,30%. Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai dengan rencana yang dilampirkan dalam periode Renstra 2020 – 2024.

g. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Anggaran : Rp52.823.000,00

Realisasi : Rp52.574.500,00

Persentase : 99,53%

Rincian Output : Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Indikator Kinerja 7 ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru memperoleh nilai 4,65, masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 5,00.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, diharapkan agar BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai nilai 5,00 sesuai yang ditargetkan oleh BPK secara keseluruhan nasional, meskipun pada tahun 2020 dan tahun 2021 capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum memenuhi target karena masih di bawah skor 5,00.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada tahun 2021 adalah dengan terus melakukan sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, serta menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarkan setiap tahun.

Meskipun telah melaksanakan upaya untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru mendapatkan skor 4,41 dari target skor 5,00. Capaian ini akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

h. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP

Anggaran : Rp0,00

Realisasi : Rp0,00

Persentase : 0,00%

Rincian Output : -

Indikator Kinerja 8 ini merupakan indikator hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK setiap tahun. Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai nilai AA sesuai dengan target yang diharapkan, serta masuk ke dalam jajaran sepuluh besar unit kerja dengan hasil evaluasi terbaik di BPK secara nasional.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan nilai evaluasi minimal A dari Inspektorat Utama BPK, dan hal ini dapat dicapai selama dua tahun berturut-turut di mana BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mampu memperoleh nilai evaluasi AA.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mengupayakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara tertib dan memperhatikan arahan-arahan dari Itama BPK serta menjalin komunikasi intensif dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan.

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memang melampaui target kinerja dengan memperoleh predikat AA dari target A yang diharapkan pada tahun 2021, namun untuk menjaga capaian tersebut BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi Itama.

i. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Anggaran : Rp2.798.413.000,00

Realisasi : Rp2.756.444.949,00

Persentase : 98,50%

Rincian Output : Layanan Perkantoran dan Layanan Prasarana Internal

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen

Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Aplikasi Manajemen Pengetahuan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang telah ada di BPK, antara lain Portal BPK, JDIH, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi *user* untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai tingkat pemanfaatan TI sebesar 99,59%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk terus mempertahankan tingkat pemanfaatan TI agar dapat berada di atas angka 96%, dan target ini dapat dicapai selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh BPK secara keseluruhan, baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

Hal tersebut memungkinkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai angka 99,66%, melampaui target sebesar 96% pada tahun 2021. BPK Perwakilan Gorontalo akan terus mengupayakan agar capaian yang diperoleh bisa tetap optimal secara konsisten, dengan terus mendorong pemanfaatan TI dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan. BPK Perwakilan Gorontalo bahkan telah memiliki portal internal yang dinamakan GOROPS, sebagai sarana *data sharing* untuk memperlancar pekerjaan di setiap subbagian di bawah Sekretariat Perwakilan serta Subauditorat Gorontalo.

j. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Anggaran : Rp7.305.944.000,00

Realisasi : Rp7.174.532.720,00

Persentase : 98,20%

Rincian Output : Layanan Perkantoran dan Layanan Prasarana Internal

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020. Untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen mencapai tingkat penerapan manajemen pengetahuan sebesar 100%, dan target tersebut dapat dilampaui selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 di mana capaian tingkat penerapan manajemen pengetahuan bisa mencapai nilai 125% dan 137,50%.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai *Best Practice* selama pemeriksaan serta menyusun dan menyampaikan usulan *Best Practice* kepada Ditama Revbang. Untuk usulan *Best Practice* yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan *sharing knowledge* pada pihak lain.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh capaian sebesar 137,5% dari target 100%, dengan memberikan usulan *best practice* terkait Layanan Konsultasi Hukum Cepat dan Akurat (Langkah Cepat) dan Penambahan *Database* Informasi Konsultasi Pada Portal *Website* Perwakilan, melaksanakan implementasi *best practice* Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA),

serta melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait dua diklat, dua forum berbagi pengetahuan, dan satu *In House Training*.

Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice*, serta melaksanakan manajemen pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

k. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Anggaran : Rp7.145.749.000,00

Realisasi : Rp7.015.102.120,00

Persentase : 98,17%

Rincian Output : Layanan Perkantoran

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Humas atau Humas dan TU Kalan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, dan untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencapai nilai kepuasan 3,80 atau dengan predikat “Memuaskan” dari para pemangku kepentingan. Pada tahun 2020, target tersebut tidak dapat tercapai karena masih mendapatkan hasil 3,47, namun pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat melampaui target dengan memperoleh capaian sebesar 3,89.

Aktivitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dapat mencapai kinerja tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan serta menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut.

Setelah melaksanakan upaya-upaya tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat memperoleh capaian skor sebesar 3,89 melampaui skor yang diharapkan sebesar 3,80 berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk BPK.

Untuk meningkatkan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK terutama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, serta menjaga kualitas hubungan serta komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo, termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.

I. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Anggaran : Rp52.823.000,00

Realisasi : Rp52.574.500,00

Persentase : 99,53%

Rincian Output : Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- 1). Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- 2). Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU Nomor 5/2014); dan
- 3). Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai pemenuhan jam diklat sebesar 100% sesuai dengan target yang diharapkan.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mempertahankan capaian pemenuhan jam diklat sebesar 100%, dan target yang diharapkan dapat terpenuhi selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2020 dan tahun 2021.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam dua tahun atau 40 jam pelajaran dalam satu tahun serta melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi target jam pelajaran yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD, diklat pemeriksaan kinerja, serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses selama pandemi COVID-19.

Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring baik yang diselenggarakan oleh internal BPK maupun oleh pihak ketiga yang relevan.

m. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Anggaran : Rp351.416.000,00

Realisasi : Rp350.336.085,00

Persentase : 99,69%

Rincian Output : Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 Tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

- 1). Penyerapan anggaran;
- 2). Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- 3). Pencapaian keluaran; dan
- 4). Efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat kinerja anggaran sebesar 87,78%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan capaian tingkat kinerja anggaran agar minimal dapat di atas 87%, dan selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2020 serta tahun 2021 target tersebut dapat dilampaui.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan serta melaksanakan evaluasi berkala atas pemanfaatan anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Pada akhir tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai skor 92,43%, lebih tinggi dari target yang diharapkan sebesar 87,50%. Untuk tetap menjaga capaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

4. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2021 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN

Perbandingan capaian IKU tahun 2021 dengan target kerja lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target					Capaian 2021
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	86,25%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	72,83%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,60%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,30%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target					Capaian 2021
				2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA GENERIK									
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,41
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (87,00)	A (87,00)	A (87,00)	AA (91,16)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	96%	96%	96%	99,66%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	137,50%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,89
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	92,43%

Tabel 4 Perbandingan Capaian IK Tahun 2021 dengan Target Kerja Lima Tahun

B. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh anggaran sebesar Rp14.691.502.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.115.052.265 atau 96,08% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun 2020 yakni anggaran sebesar Rp18.305.999.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.412.347.559,00 atau 95,12%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selama Tahun Anggaran 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak sebelas kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp15.541.709.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp14.691.502.000,00. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program yakni Program Pemeriksaan Keuangan Negara, yang kemudian dialokasikan untuk mencapai Indikator Kinerja yang ditargetkan selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	991.776.066,67	925.107.508,17	93,28%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	956.296.066,67	889.736.345,67	93,04%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	139.223.666,67	137.094.234,17	98,47%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	921.634.066,67	855.498.820,67	92,82%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	0,00	0,00	0,00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	921.634.066,67	855.498.820,67	92,82%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	52.823.000,00	52.574.500,00	99,53%
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	0,00	0,00	0,00%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	2.798.413.000,00	2.756.444.949,00	98,50%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	7.305.944.000,00	7.174.532.720,00	98,20%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	7.145.749.000,00	7.015.102.120,00	98,17%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	52.823.000,00	52.574.500,00	99,53%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	351.416.000,00	350.336.085,00	99,69%

Tabel 5 Alokasi Anggaran Dalam Rangka Mencapai Indikator Kinerja yang Diharapkan

BAB IV PENUTUP

A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM

Pada tahun 2021 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 99,51 di mana skor tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,08 jika dibandingkan dengan pencapaian skor kinerja tahun 2020 sebelumnya sebesar 98,43.

B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR

Pencapaian skor tahun 2021 sebagai tahun kedua periode Renstra 2020 – 2024 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan tahun 2020. Keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ditandai dengan tercapainya sepuluh Indikator Kinerja dan hanya tiga Indikator Kinerja yang tidak terpenuhi. Adapun penjelasan ringkasnya sebagai berikut.

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang capaiannya masih di bawah target yaitu 86,25% dari 100%. Meskipun indikator ini menunjukkan adanya perbaikan di banding tahun 2020 yang hanya mencapai 71,43%, namun permasalahan yang dihadapi masih sama yaitu adanya catatan dari Direktorat EPP atas hasil LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan perbaikan lebih lanjut di tahun 2021 dengan cara meningkatkan *quality control*, *quality assurance*, dan *cross review* antar pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan capaiannya mencapai 100% sesuai dengan target sama seperti tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk menjaga capaian ini melalui upaya peningkatan kualitas *quality control* dan *quality assurance*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan;
3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan capaiannya hanya 72,83%, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 76,31% dan tidak mencapai target sebesar 75%. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kualitas rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan secara cepat oleh pihak pemerintah

daerah, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu untuk terus mendorong Pemerintah Daerah agar menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dan surat kepada Kepala Daerah serta memaksimalkan aplikasi SiPTL. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mulai membuka kesempatan tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut;

4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional capaiannya memenuhi target sama seperti tahun sebelumnya, di mana tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai 100%. Hal ini memungkinkan karena pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, penyelenggaraan pendidikan vokasi, serta upaya mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. Untuk tahun-tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional;
5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan capaiannya 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tetap secara konsisten berupaya untuk memenuhi setiap permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan;
6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal capaiannya melampaui target, yaitu 100,30% dari 100%, sama seperti tahun sebelumnya yang juga melampaui target. Hal ini dimungkinkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 telah melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan terkait pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sehingga capaian Indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,30%;
7. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK capaiannya masih belum memenuhi target seperti tahun sebelumnya, yaitu hanya memperoleh nilai 4,41 dari target

sebesar 5,00, bahkan turun dari nilai tahun 2020 sebesar 4,47. Hal ini disebabkan karena masih ada aspek-aspek nilai dasar BPK yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dan akan diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim;

8. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP capaiannya telah melampaui target sama seperti tahun sebelumnya, yaitu mendapat nilai 91,16 (AA) dibandingkan dengan target sebesar 87,00 (A). Hal ini dimungkinkan karena penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dilakukan secara tertib serta memperhatikan arahan-arahan dari Itama. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga secara intensif menjalin komunikasi dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan;
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, capaiannya adalah 99,66% melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan TI dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan terus didorong secara konsisten di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo bahkan telah memiliki portal internal yang dinamakan GOROPS, sebagai sarana *data sharing* untuk memperlancar pekerjaan di setiap subbagian di bawah Sekretariat Perwakilan serta Subauditorat Gorontalo;
10. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, capaiannya adalah 137,50% melampaui target sebesar 100% sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan memberikan usulan *best practice* terkait Layanan Konsultasi Hukum Cepat dan Akurat (Langkah Cepat) dan Penambahan *Database* Informasi Konsultasi Pada Portal *Website* Perwakilan, melaksanakan implementasi *best practice* Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA), serta melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait dua diklat, dua forum berbagi pengetahuan, dan satu *In House Training*.
11. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, capaiannya lebih baik dari tahun 2020 yang masih di bawah target, di mana pada tahun 2021 capaian IK ini mencapai 3,89, melampaui target yang diharapkan

sebesar 3,80. Capaian ini dimungkinkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti entitas, media, serta pihak-pihak lain seperti penyedia jasa serta instansi vertikal lainnya. Hal ini akan terus ditingkatkan lagi pada tahun 2022;

12. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, capaiannya adalah 100% dari 100% sesuai target, sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD dan diklat pemeriksaan kinerja, serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses selama pandemi COVID-19;
13. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran, capaiannya melampaui target sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar 92,43% dibandingkan target 87,50%. Hal ini dimungkinkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IKU TAHUN 2021

Kendala/hambatan dalam pencapaian IKU tahun 2021 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Tidak tercapainya target IKU 1 terjadi karena pemeriksaan tahun 2021 masih dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19 dan proses pemeriksaan harus mengalami penyesuaian, diantaranya dengan mengoptimalkan pemeriksaan berbasis daring serta membatasi kontak langsung dengan entitas yang diperiksa. Selain itu, proses pelaporan dilakukan secara ketat sesuai dengan protokol kesehatan dan kondisi wilayah Gorontalo, sehingga meskipun telah diupayakan *quality assurance*, *quality control*, *cross review* dan diskusi terarah, namun Direktorat EPP masih menemukan catatan-catatan yang harus diperbaiki lagi oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Atas kelemahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan proses penyusunan secara lebih intens,

mengoptimalkan upaya *quality assurance*, *quality control*, *cross review* dan diskusi terarah agar LHP yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

2. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 3 tidak tercapai karena selama tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kualitas rekomendasi sehingga pemerintah daerah membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut. Selain itu, kurangnya komunikasi dan komitmen pemerintah daerah juga membuat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi terhambat, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mulai mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

3. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Target IKU 7 masih belum tercapai karena IK ini pegawai masih belum familiar dengan survei yang dikirimkan via *e-mail* BPK sehingga masih memerlukan sosialisasi yang lebih memadai serta pendampingan pegawai ketika mengisi kuesioner dari pihak ketiga. Hal ini akan diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim. Selain itu, akan ditingkatkan komunikasi dengan LO dari pihak Direktorat PSMK untuk menjamin agar seluruh pegawai penerima survei telah mengisi survei yang dikirimkan.

D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2021

Strategi dan rencana aksi dalam pemenuhan target tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

2. Mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dan surat kepada Kepala Daerah serta memaksimalkan aplikasi SiPTL;
3. Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut;
4. Terus melakukan sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarkan setiap tahun, serta melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim;
5. Meningkatkan komunikasi dengan pihak Direktorat PSMK untuk memastikan bahwa seluruh pegawai penerima survei via *e-mail* telah melaksanakan kewajibannya mengisi kuesioner implementasi nilai dasar BPK;
6. Terus melaksanakan proses bisnis yang telah menghasilkan capaian sesuai target atau melampauinya, sambil terus meningkatkan hal-hal yang masih bisa diperbaiki ke depannya; dan
7. Terus berkomunikasi dengan Itama selaku pengawas internal BPK terkait penyempurnaan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta Unit Kerja terkait seperti Direktorat EPP dan Direktorat PSMK agar capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**